

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait penelitian dengan judul “Analisis Komunikasi Humas Pemerintah Kabupaten Sampang (Studi Kasus Informasi Organisasi di Dinas Komunikasi dan Informatika)”, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Diskominfo Kabupaten Sampang mengalami ketidakjelasan organisasi, sehingga membutuhkan rumusan strategi komunikasi organisasi dari permasalahan sistem komunikasi dan penyebaran informasi antara Kepala Dinas dengan pegawai Humas eksternal pemerintah. Kepala dinas melimpahkan tugas penanganan operasional terhadap Kabid IKP untuk mempermudah pekerjaan, mengingat Humas eksternal pemerintah masuk ke dalam bidang tersebut.
2. Kadis merasakan permasalahan sistem komunikasi (kurangnya komunikasi) dan penyebaran informasi, perlu diadakan pembenahan. Usaha Kadis dalam mengatasinya yakni memanfaatkan sistem teknologi komunikasi, dengan membuat sebuah *platform* digital yang dapat digunakan untuk rapat besar Diskominfo secara daring. *Platform* tersebut guna evaluasi kerja pegawai secara umum yang berlangsung setiap minggunya dan bernama *weekly meeting*. Pelaksanaan *weekly meeting* berjalan dengan lancar, namun seiring dengan berjalannya waktu *platform* tersebut tidak lagi diaktifkan.
3. Hasil penelitian terkait metode *SWOT* dan metode *AHP* pada informasi organisasi, menghasilkan beberapa strategi komunikasi organisasi. Analisis *SWOT* menghasilkan posisi Diskominfo selaku Humas eksternal pemerintah dalam matriks IFAS dan EFAS, mengalami pertumbuhan pesat berkat program *weekly meeting* dan Tiktok Kabupaten Sampang dengan total nilai IFAS 4,3 dan EFAS 4,2. Strategi *SWOT* dari matriks menghasilkan enam strategi, antara lain:
 - a. Strategi *SO*: Memperkuat dan mengembangkan Tiktok sebagai media Humas eksternal pemerintah.

- b. Strategi *ST*: Mengevaluasi dan memperkuat sistem *weekly meeting*.
- c. Strategi *WO*:
 - 1) Mengembangkan program Ibudita (Implementasi Budaya Digital *Transformation*).
 - 2) Melakukan inovasi terkait fasilitas media informasi Pemerintah Kabupaten Sampang.
- d. Strategi *WT*:
 - 1) Meningkatkan keterbukaan informasi terkait pelaksanaan tugas.
 - 2) Memperkuat ciri khas konten Kabupaten Sampang.

Metode AHP digunakan untuk menyusun strategi komunikasi Diskominfo dalam mengatasi permasalahan sistem komunikasi dan penyebaran informasi secara berurutan, antara lain:

- a. Tujuan utama (prioritas) pelaksanaan strategi Diskominfo yaitu terciptanya komunikasi dan penyebaran informasi yang terbuka antar setiap hierarki dengan bobot 0,42.
 - b. Faktor pendukung strategi yang menjadi prioritas utama adalah Tiktok Kabupaten Sampang unggul dari Kabupaten lain di Madura dengan *followers* 20.600 dengan bobot 0,2.
 - c. Aktor utama pada pelaksanaan strategi Diskominfo yakni Kepala Diskominfo dengan bobot 0,16.
 - d. Alternatif strategi yang menjadi prioritas Diskominfo ialah mengevaluasi dan memperkuat sistem *weekly meeting* dengan bobot 0,28.
4. Pelaksanaan komunikasi organisasi Diskominfo setelah mendapati Tupoksi Humas pemerintah belum efektif, dikarenakan adanya kendala dalam arah komunikasi ke atas. Kadis cenderung melaksanakan komunikasi ke bawah yang melibatkan jajaran pimpinan Humas pemerintah yakni Kabid IKP dan seksi KMP.
 5. Aliran informasi pekerjaan Humas pemerintah cukup beragam dan sedikit acak, karena melibatkan berbagai pihak. Terdapat kombinasi aliran informasi yakni serentak melalui Kepala Daerah, Prokopim, & OPD pada grup WA dan berurutan melalui surat tugas yang diberikan menuju Sekretariat Diskominfo.

6. Iklim komunikasi organisasi pegawai Humas pemerintah cukup baik dengan mengutamakan kekeluargaan dan kerjasama tim.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis

Pemberian tugas kepada pegawai yang berkaitan dengan fungsi Humas eksternal Pemerintah Kabupaten Sampang, sebaiknya berdasarkan tupoksi dan kompetensi (*skill*), agar pekerjaan dapat selesai dengan maksimal. Pegawai yang sukses dan produktif juga membutuhkan *support* dari lingkungan kerja, lingkungan informasi, dan pelaksanaan komunikasi organisasi yang baik.

5.2.2 Saran Teoritis

Teori Pengorganisasian Karl Weick dan Teori Kewenangan Chester Barnard digunakan sebagai landasan dari penelitian ini, khususnya dalam riset di lapangan. Teori Pengorganisasian Karl Weick memiliki 12 perspektif. Berdasarkan hasil penelitian, Diskominfo Kabupaten Sampang menerapkan 10 perspektif, sehingga terdapat 2 perspektif yang belum terealisasi secara optimal dan dibutuhkan peningkatan, yaitu:

- a. Menerapkan konsep sistem yang tepat, mulai dari makna lingkungan, permeabilitas, dan komponen sistem berupa saling ketergantungan.
- b. Proses *sensemaking* berkaitan erat dengan aturan dan keputusan yang diambil organisasi dalam mengatasi situasi abstrak yang rendah, tetapi siklus dan sistem komunikasi yang kompleks diperlukan dalam memahami lingkungan informasi yang begitu abstrak.

Teori Kewenangan cukup menggambarkan bagaimana Diskominfo sebagai organisasi. Diskominfo Sampang menerapkan 9 *point* penting dari Teori Kewenangan, 3 *point* teori yang tidak diterapkan yakni

- a. *Point* eksekutif mempercayai bahwa pesan yang diterima tidak bertolak belakang dengan tujuan organisasi belum diterapkan, karena pegawai Humas mendapat perintah kerja dari Kabid IKP dan seksi KMP.
- b. *Point* eksekutif mampu memahami bahwa ketika memilih untuk bekerjasama, maka segala pesan yang didapat sesuai dengan minatnya

belum diterapkan karena, kemampuan kepala dinas mengatur seluruh bidang Diskominfo belum terlihat maksimal.

- c. *Point* penerimaan pesan tertentu tidak efektif dan sukar dianalisa, dinilai, dan diterima, ataupun ditolak secara sengaja. Pegawai Humas pemerintah memahami pesan yang diberikan kepala dinas melalui grup WA dan tidak pernah terjadi penolakan pesan.